



K I N E R J A F I S K A L

Aryan Eka Prastya Nugraha

2018

ISSUE

- "digital finance" diharapkan mampu meningkatkan pemasukan pajak
- Kinerja fiskal dinilai belum maksimal tahun 2018
- kebijakan fiskal memiliki peran sangat penting dalam geliat perekonomian nasional.

Mengapa Reformasi Fiskal harus dilakukan?

Kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

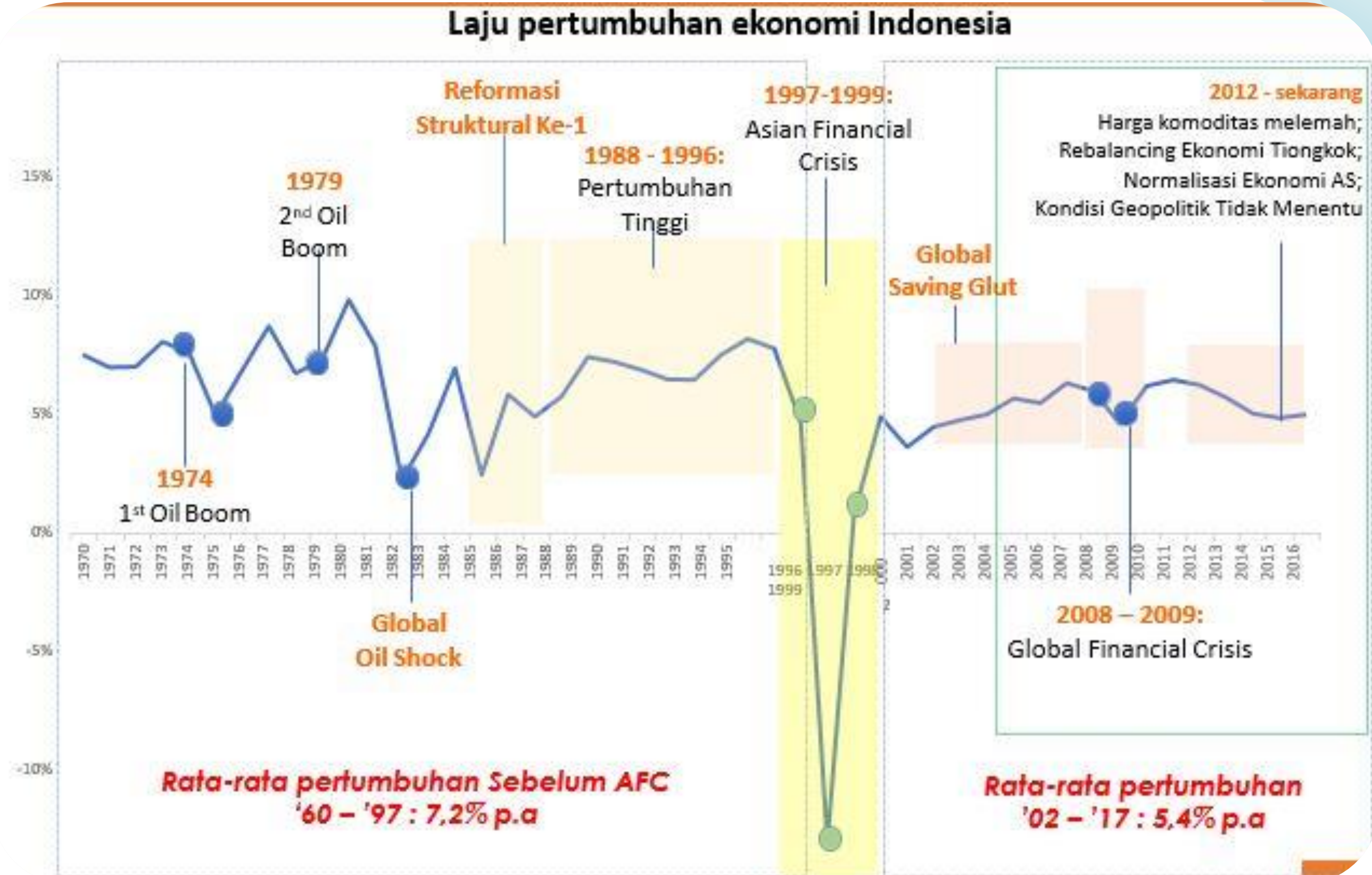
- Minimal **6+ % p.a** dibutuhkan untuk :

- 1.menciptakan lapangan kerja bagi 1,8 juta new entrants

- 1% growth = 250 ribu- 300 ribu jobs

- 2.Mengurangi kemiskinan di bawah 10 % dan mengurangi near poor di bawah 30% dari populasi.

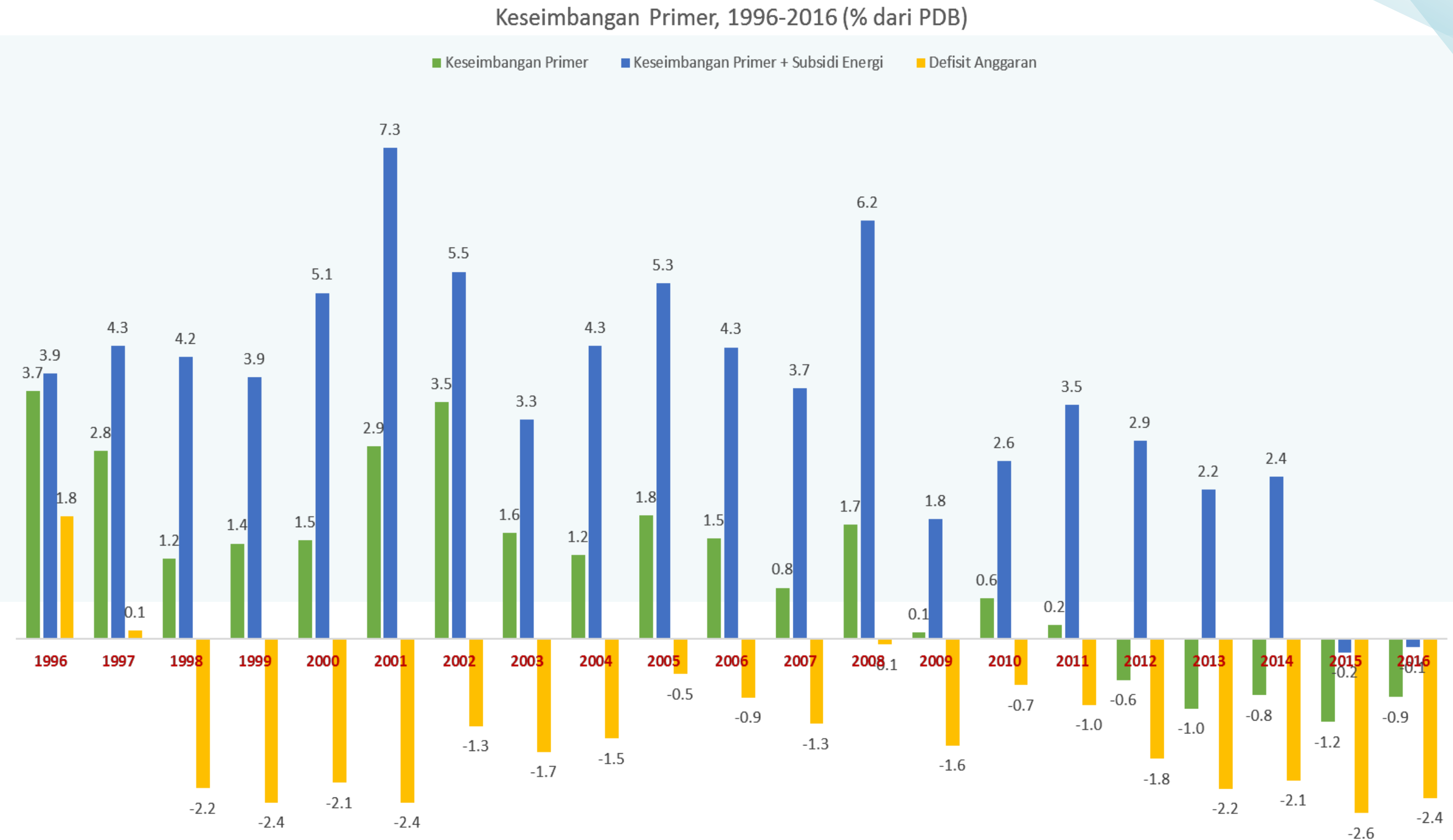
- Minimal **tumbuh 8% p.a** untuk memanfaatkan secara optimal *demographic dividen* guna menghindari *Middle Income Trap*



Mengapa Reformasi Fiskal harus dilakukan?

Untuk memperkuat ketahanan (resilience) ekonomi Indonesia

- Kondisi ekonomi global dan nasional tidak selalu linier dan stabil.
 - ✓ Indonesia perlu menjaga “fiscal space/buffer” untuk ketahanan ekonomi menghadapi shock (counter cyclical)
 - ✓ Pengalaman AFC 1998 dan GFC 2008, ketahanan ekonomi tergantung pada kesiapan dan ketahanan suatu negara menghadapi krisis.
 - ✓ *Fiscal Spaces* sudah banyak digunakan untuk mendukung perekonomian selama periode post AFC 1998 dan GFC 2008
- Masih ada *contingent liability* yang akan bisa menjadi beban fiskal pemerintah.
 - ✓ Sistem Jaminan social
 - ✓ Pemilikan pemerintah BUMN
 - ✓ UU Bank Indonesia
 - ✓ Jaminan terhadap Simpanan Masyarakat



Mengapa Reformasi Fiskal harus dilakukan?

Kebutuhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan ekonomi.

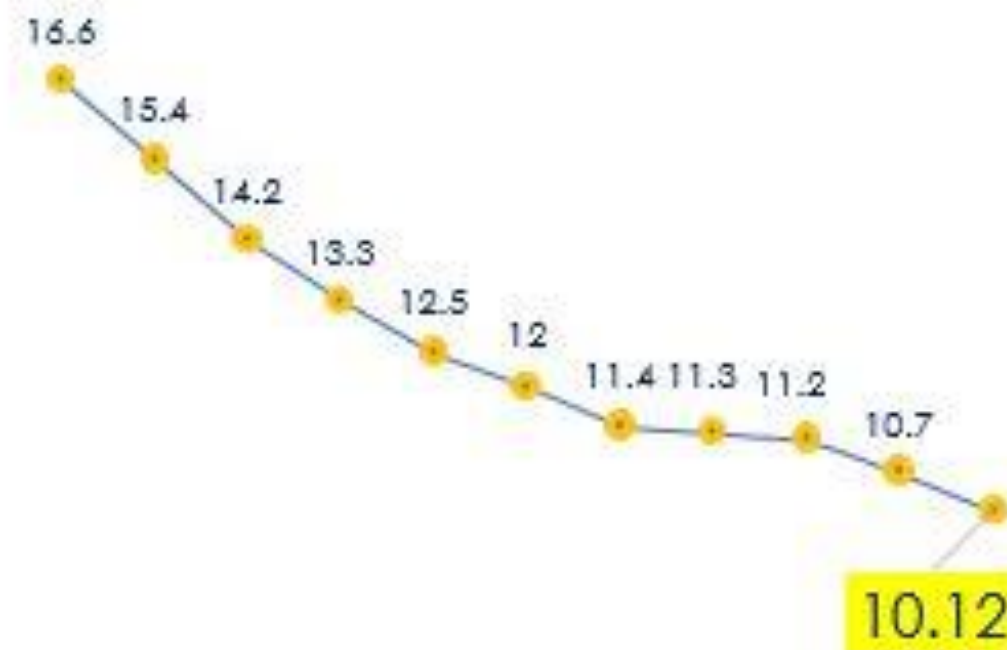
- Mekanisme pasar tidak cukup dan tidak mampu bekerja untuk mengurangi kemiskinan.

✓ Tidak cukup insentif bagi pelaku ekonomi untuk menciptakan kegiatan ekonomi bagi kelompok rumah tangga berpendapatan rendah.

- Kegagalan mekanisme pasar cenderung menciptakan pemusatan kekuatan ekonomi.

Catatan: kepemilikan negara atas sumber daya alam dan bad public governance (seperti korupsi) sama potensinya seperti kegagalan mekanisme pasar terhadap inequality

Angka Kemiskinan (%)

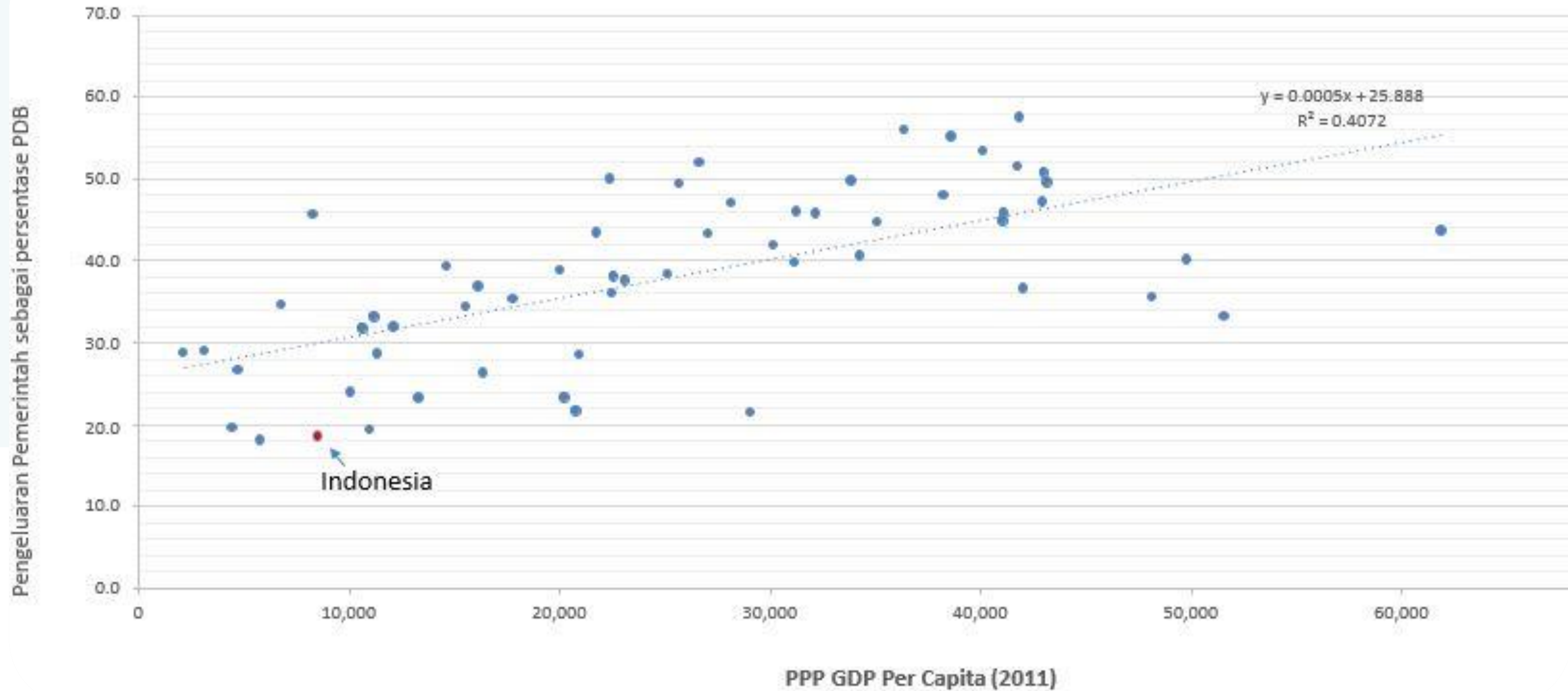


Ketimpangan (GINI Ratio)

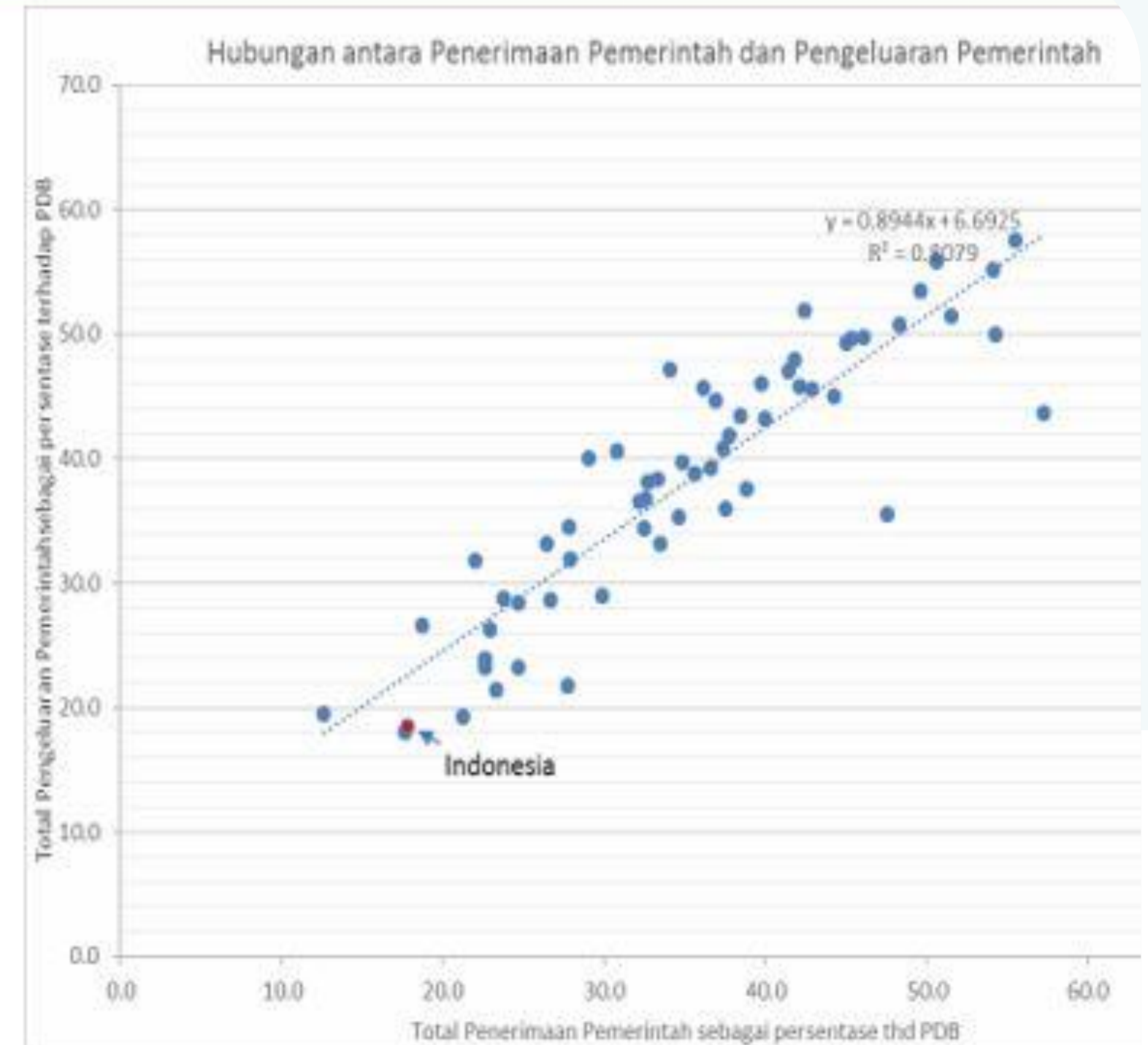
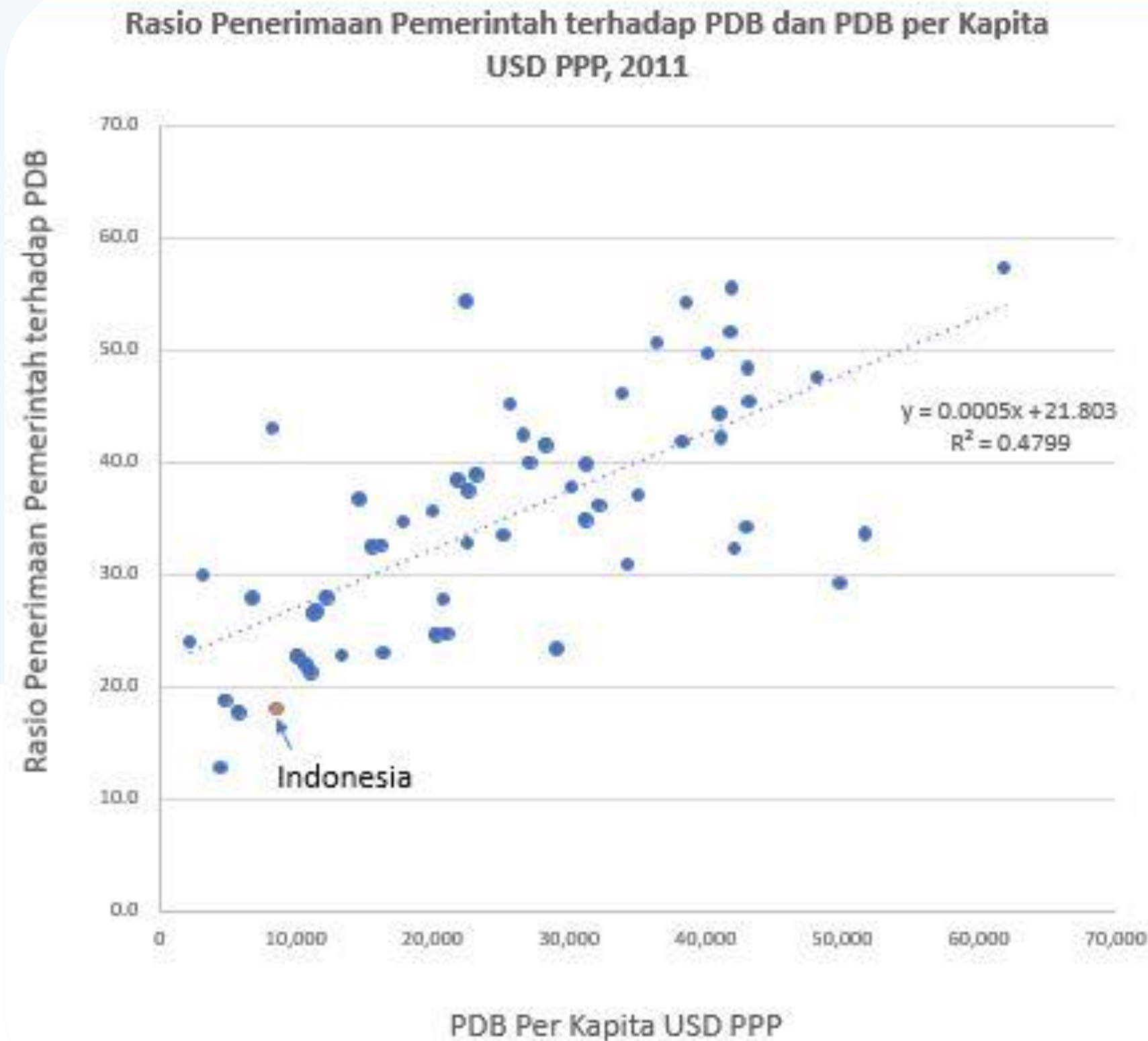


T e t a p i pengeluaran pemerintah terhadap P D B m a s i h di bawah pola normal

Gambar 1: Pengeluaran Pemerintah sebagai Persentase terhadap GDP Per Kapita (2011 PPP), 2011

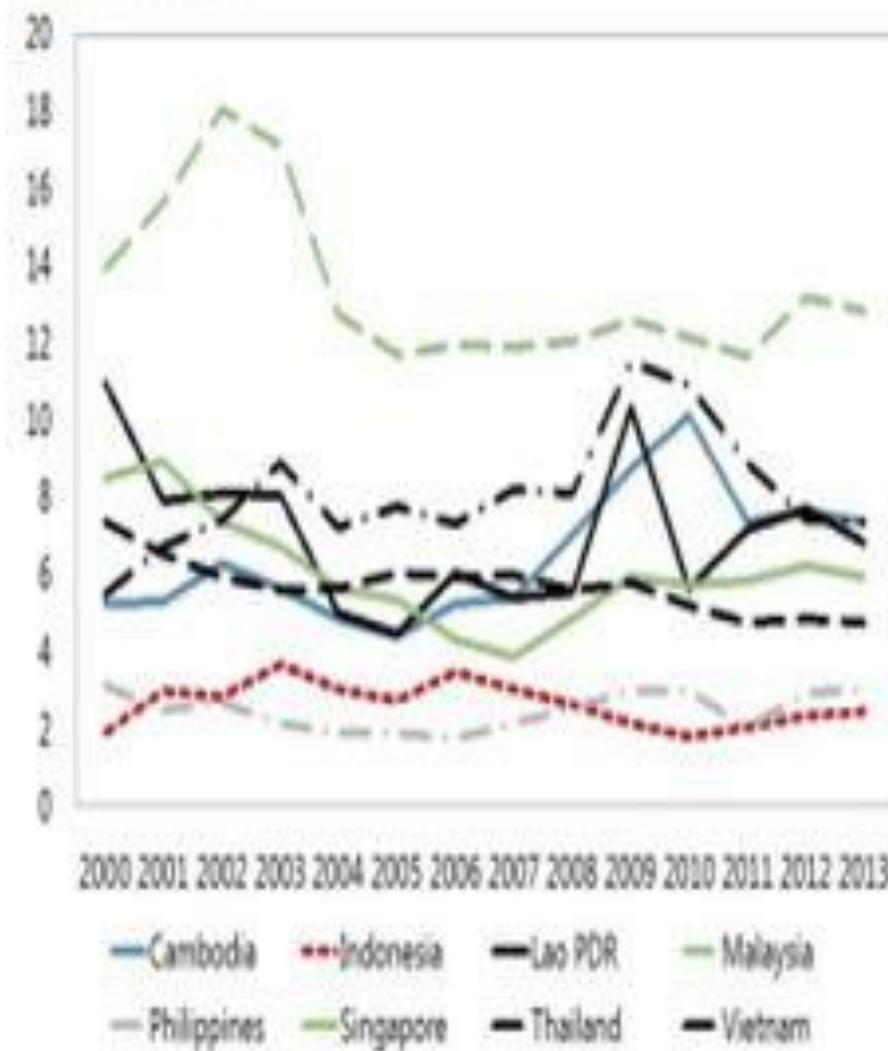


Begitu pula penerimaan pemerintah p e r P D B juga di bawah pola normal



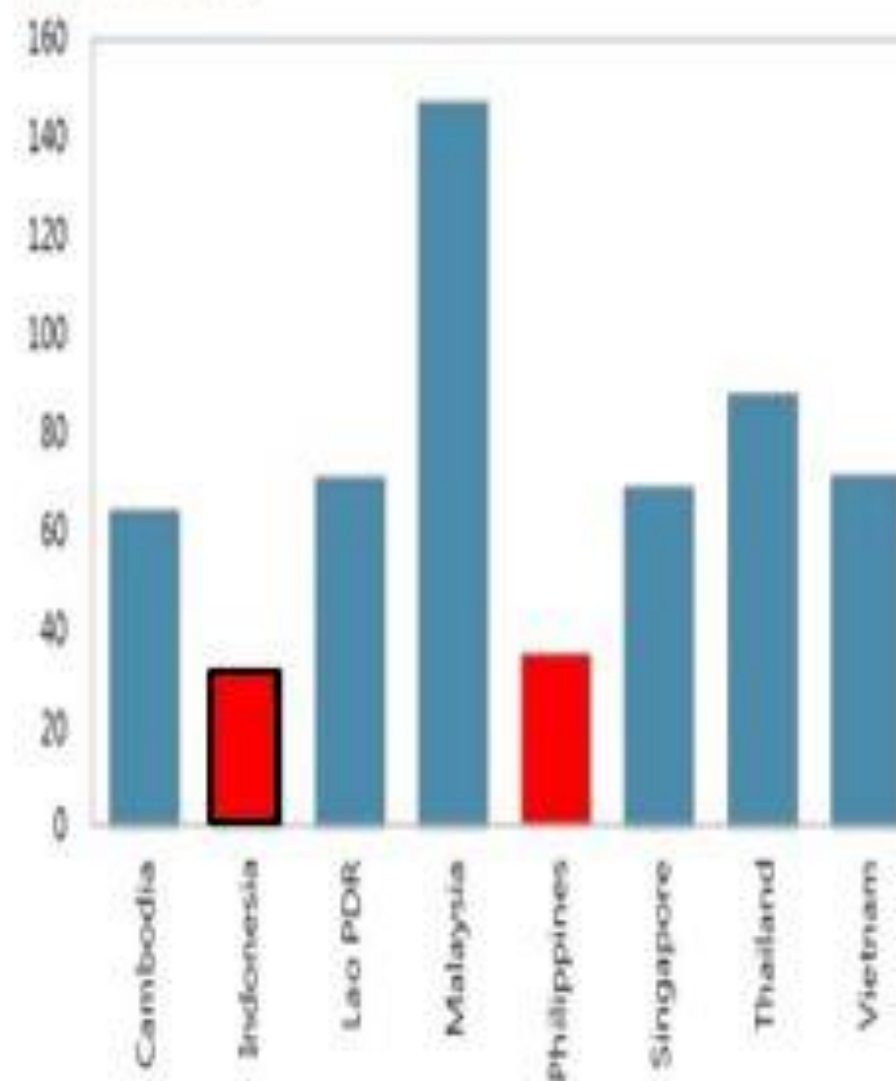
Public Investment

(In percent of GDP)



Public Capital Stock, 2013

(In percent of GDP)



Sumber	Nasional	Kota	Desa
Meningkatkan kesenjangan			
Listrik	*	*	1,25
Telepon	1,19	1,54	2,29
Air bersih	1,50	1,26	1,36
SPP-Pendidikan	1,56	1,35	1,36
Bensin	1,91	1,68	2,49
Solar	3,00	2,51	5,90
Transportasi public	*	*	1,28
Netral terhadap perubahan kesenjangan			
Listrik	1,09	0,96	*
Transportasi public	1,10	*	*
Mengurangi kesenjangan			
Minyak tanah	0,20	-0,08	0,77
Transportasi public	*	0,88	*

Sumber: Penghitungan LPEM FEUI, 2003

Track 1a: Tax Reform

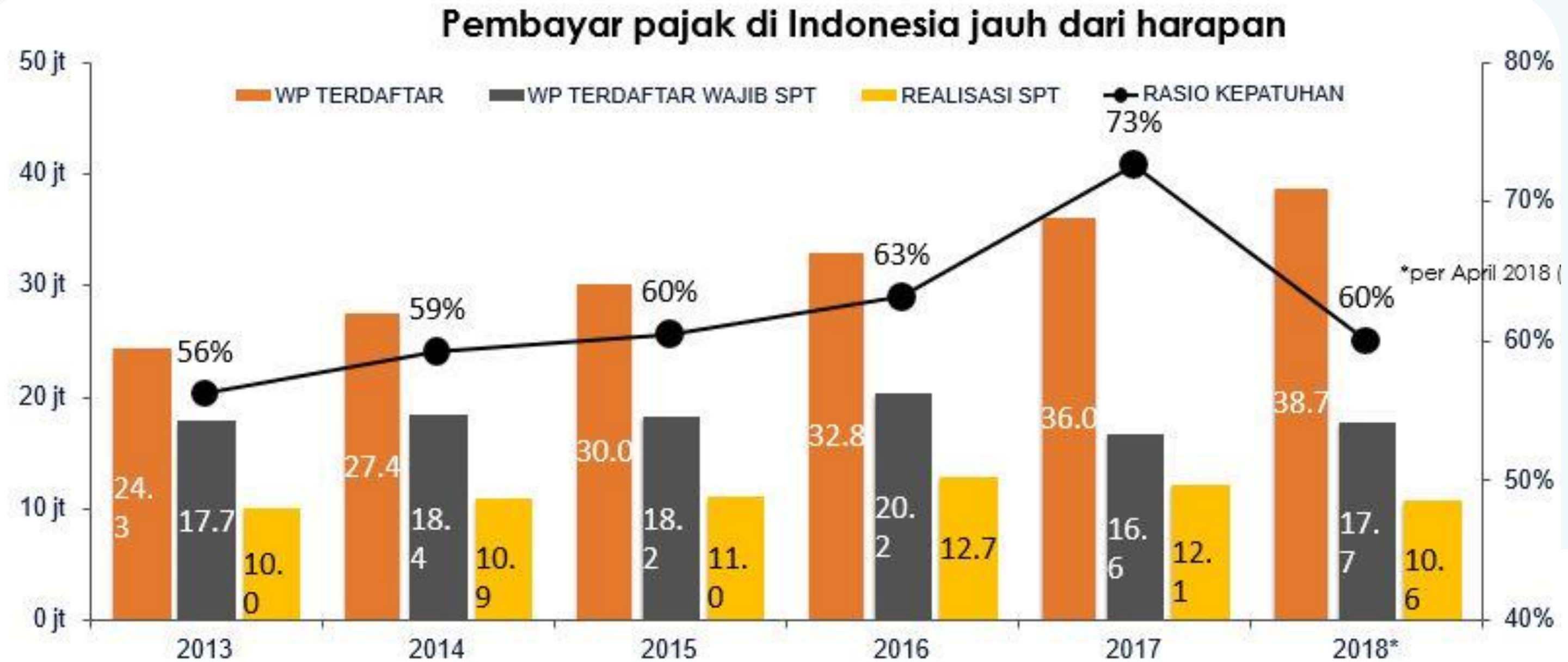
1. Perluasan Basis Pajak

- Pembayar pajak di Indonesia jauh dari harapan
- Pelajaran dari Tax Amnesty 2016-2017:
 - kontributor pembayar tax amnesty adalah pembayar pajak yang telah berkontribusi. Artinya pembayar pajak yang tergolong “patuh” pun tidak membayar pajak seperti yang seharusnya.
 - Pembayar pajak baru masih minimal. Masih banyak penduduk Indonesia yang seharusnya membayar pajak tetapi tidak patuh dan tidak membayar pajak.

2. Perbaikan tax administration

- Sistem IT yang ada jauh dari memadai. Perlu perbaikan secara menyeluruh untuk memperbaiki *tax payer's confidence* dan integritas sistem perpajakan

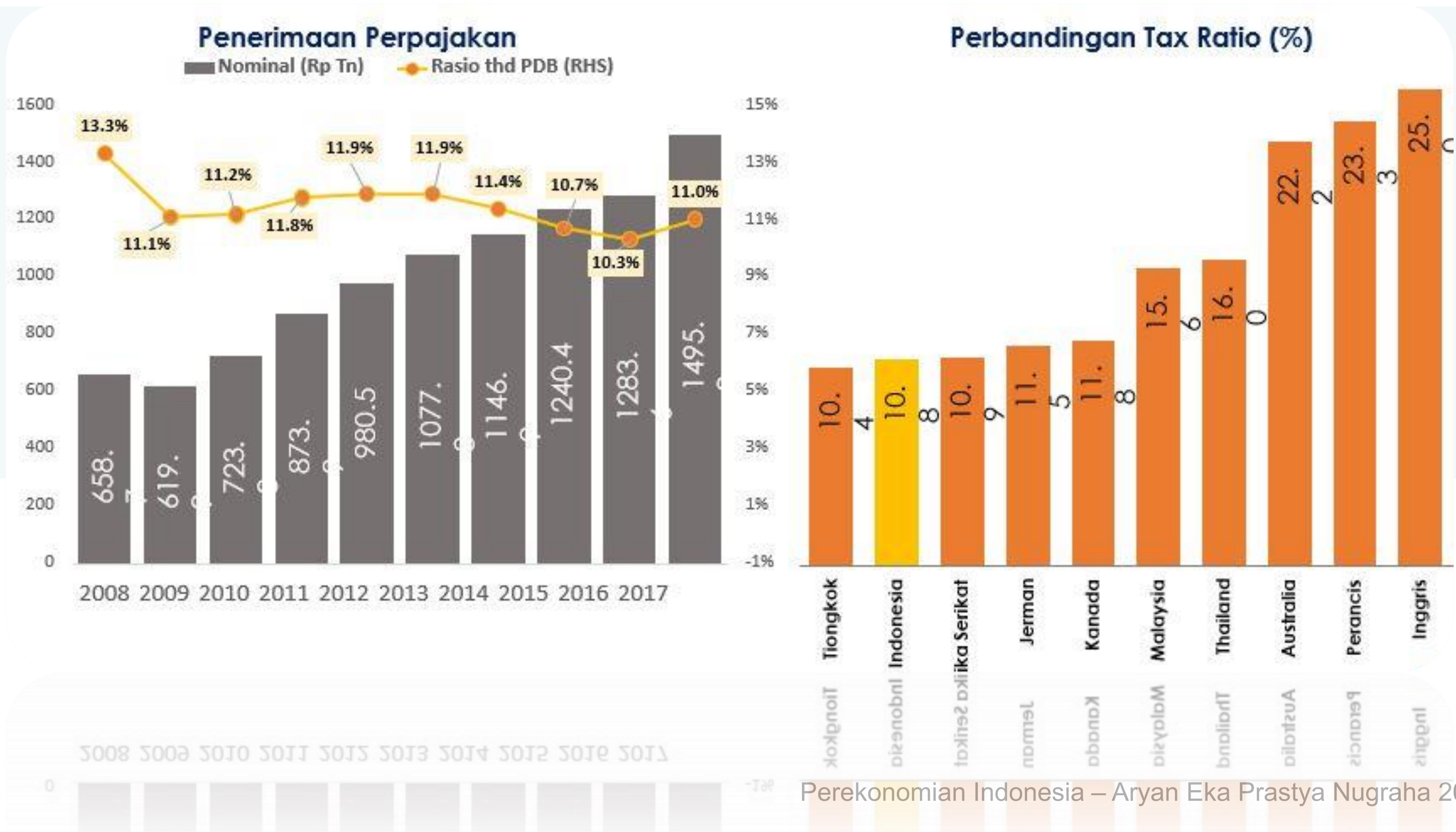
Kepatuhan Pajak Masih Rendah Jumlah Pegawai Pajak Juga Masih Terbatas



Jumlah Pegawai DJP : 42.733 orang

Jumlah Pegawai DJP : 42.733 orang

Berujung Pada Tax Ratio Yang Rendah



Tujuan reformasi pajak

- Peningkatan penerimaan pajak per PDB dengan menutup “compliance gap”.
- Perbaikan iklim investasi dengan mengurangi biaya tax compliance dari wajib pajak.
- Efisiensi Tax Administration dengan meminimalkan biaya pemerintah dalam menjalankan sistem perpajakan
- Membangun public trust and confidence terhadap integritas sistem perpajakan.


Prinsip-prinsip reformasi pajak

- **Simplicity:** tax system and tax administration should be easy to comply
- **Predictability:** tax law and regulation should be clear, accessible and consistently applied.
- **Effectiveness:** Tax Payer services and enforcement programs should be tailored to the specific characteristic of large, medium and small tax payers.
- **Integrity:** zero tolerance for corruption
- **Performance:** There should be incentives for high performance and accountability for result.
- **Transparency:** Actions taken by tax administration should be subject to scrutiny and results widely publicized
- **Efficiency :** paper-based should be minimized through investment in modern technology.
- **Quality :** problems should be identified and resolved before they become disputes
- **Fairness:** Dispute resolution should be fast, lost cost and imparsial
- **Professionalism :** Tax officer should be competent and highly motivated.

TASK

TULIS KEMBALI HASIL PENDAPAT KELOMPOK ANDA,
BERDASARKAN ISSUE HARI INI.

MINIMAL 2 PARAGRAF DAN UPLOAD DI SIP

The background is white with teal geometric shapes in the corners. The top-right corner has a large teal shape, and the bottom-left corner has a smaller teal shape.

THANK YOU!

ANY QUESTIONS?